



URGENSI REVITALISASI GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA



GTRA SUMMIT KARIMUN 2023

Drs. Dalu Agung Darmawan, M.Si.

DIREKTUR JENDERAL PENATAAN AGRARIA

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Konferensi Tingkat Tinggi BRICS ke-15 BRICS, Afrika Selatan



Presiden Joko Widodo dalam pidatonya mengatakan ***bahwa dunia saat ini seakan bergerak tanpa nahkoda, bergerak tanpa kompas yg jelas.***

Perang dan konflik telah menyebabkan tragedi kemanusiaan berkepanjangan. ***Krisis pangan telah mengakibatkan puluhan juta orang jatuh miskin.***

Johannesburg, 22 -24 Agustus 2023



Apabila pernyataan Presiden dimaksud digunakan untuk *merefleksikan kondisi dan situasi Indonesia saat ini, khususnya dalam pengelolaan agraria, dan diselaraskan dengan berbagai fenomena ketimpangan penguasaan tanah dan berbagai konflik agraria yang terjadi,*

Maka pernyataan tersebut menjadi alarm bagi kita, selaku institusi yang mendapatkan amanat untuk mendorong keadilan dan kemakmuran khususnya dalam penataan aset dan penataan akses.

CAPAIAN REFORMA AGRARIA SAMPAI 28 AGUSTUS 2023



Reforma Agraria

Tanah Obyek Reforma Agraria

01	Legalisasi Aset 4.5 Juta Ha	02	Redistribusi Tanah 4.5 Juta Ha
<p>Tanah Transmigrasi Sertifikasi Hak Milik Tanah Transmigrasi Target: 0.6 Juta Hektar</p>	<p>Pendaftaran Tanah/PTSL Pensertipikatan tanah masyarakat secara sistematis Target 3.9 Juta Ha</p>	<p>Ex-HGU, Tanah Terlantar & Tanah Negara Lainnya Redistribusi Tanah Negara dari HGU habis tidak diperpanjang, tanah terlantar dan TN lainnya Target 0.4 Juta Ha</p>	<p>Pelepasan Kawasan Hutan Pelepasan Kawasan hutan untuk TORA Target 4.1 Juta Ha Sudah menjadi APL: 1.665.474 ha a.Sudah Sertipikat: 351.367,08 ha b.Potensi Objek Redis: 572.777,73 ha c.Perlu Analisis lanjutan: 743.963,71 ha</p>
<p>Capaian: 207.216 bidang seluas 138.834,72 ha* (23,14%)</p>	<p>Capaian: 30.961.283 Bidang seluas 9.173.953 ha** (235,23%)</p>	<p>Capaian: 2.110.138 bidang, Seluas 1.351.042,09 ha*** (337,76%)</p>	<p>Capaian: 738.878 bidang Seluas 354.359,28 ha*** (8,64%)</p>

TOTAL Legalisasi Aset seluas 9.312.787,72 Ha (206,95%)

Catatan: Skema RA RPJMN 2015-2019 tetap dilanjutkan pada RPJMN 2020-2024

Sumber data: 1. (*) Data Realisasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi , Update 25 Mei 2023

2. (**) Data Pendaftaran Tanah/PTSL 17 Juni 2023

3. (***) Data Redistribusi Tanah <https://penataanagraria.atrbpn.go.id/Reforma#> accessed 28 Agustus 2023

SEBARAN 70 LOKASI PRIORITAS REFORMA AGRARIA (LPRA) USULAN CSO



CSO Pengusul	Total Keseluruhan
KPA	315
SPI	173
GEMA PS	14
WALHI	30
TOTAL	532

Provinsi	Sumatera Utara	Sumatera Barat	Riau	Jambi	Sumatera Selatan	Bengkulu	Banten	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur	Bali	NTB	Sulawesi Tengah	Sulawesi Utara	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tenggara	Total
TOTAL	8	2	1	4	2	3	4	12	10	11	2	2	1	2	3	3	70

SEBARAN 70 LOKASI PRIORITAS REFORMA AGRARIA (LPRA) USULAN CSO

22 Lokasi berkaitan dengan Kementerian BUMN (PTPN)

Permasalahan penguasaan masyarakat yang berada pada Aset BUMN

P1: Sumatera Utara (2 lokasi).

P2 : Jawa Barat (4 lokasi); Jawa Tengah (4 lokasi); Jawa Timur (3 lokasi); Sulawesi Selatan (2 lokasi); Sumatera Utara (6 lokasi); Sumatera Barat (1 lokasi). **20 lokasi**

2 lokasi berkaitan dengan Proses Hukum

Permasalahan dengan proses hukum

P2: Riau (1 lokasi); Banten (1 lokasi). - **2 lokasi**

8 lokasi berkaitan dengan Pemerintah Daerah (BMD/BUMD)

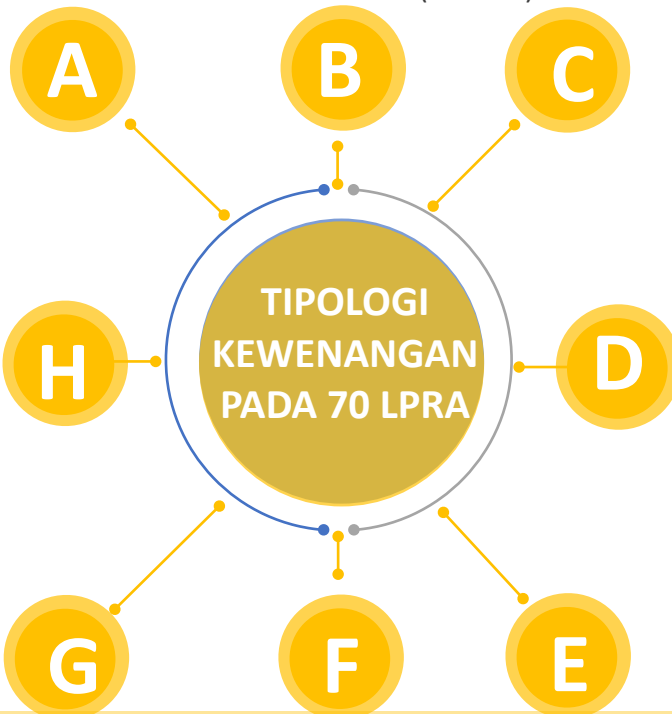
Permasalahan penguasaan masyarakat yang berada pada Aset Pemerintah Daerah

P2 : Jawa Barat (3 lokasi); Jawa Tengah (1 lokasi); Jawa Timur (1 lokasi); Sulawesi Tenggara (1 lokasi); NTB (1 lokasi); Bali (1 lokasi). **8 lokasi**

1 lokasi berkaitan dengan TNI

Permasalahan penguasaan masyarakat yang berada pada Aset TNI

P2: Jawa Timur (1 lokasi) – **1 lokasi**



6 lokasi berkaitan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Permasalahan penguasaan masyarakat dalam Kawasan Hutan

Selesai: Jambi (1 lokasi); Bali (1 lokasi); Sumatera Selatan (1 lokasi); Jawa Timur (3 lokasi). - **6 lokasi**

15 lokasi terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN

Permasalahan penguasaan masyarakat pada Tanah Negara yang bersumber dari Eks HGU/HGB/HP Perusahaan Swasta

Selesai: Jawa Timur (1); Jawa Tengah (1)

P1: Jawa Barat (2 lokasi); Banten (1 lokasi); Jambi (1 lokasi); Jawa Timur (1 lokasi); NTB (1 lokasi); - **6 lokasi**

P2: Jawa Barat (2 lokasi); Jawa Tengah (1 lokasi); Jawa Timur (1 lokasi); Banten (1 lokasi); Jambi (1 lokasi); Sulawesi Utara (1 lokasi). - **7 lokasi**

14 Lokasi berkaitan dengan HGU swasta

Permasalahan penguasaan masyarakat pada HGU Aktif milik Perusahaan Swasta

Selesai : Jawa Barat(1); Bengkulu (3); Jawa Tengah (1); Sulawesi Utara (1); Sulawesi Tenggara (1); Banten (1 lokasi); Jawa Timur (1 lokasi); Sulawaesi Tengah (1 lokasi).-**10 lokasi**

P2 : Jawa Tengah (1 lokasi); Sulawesi Selatan (1 lokasi); Sumatera Barat (1 lokasi); Jambi (1 lokasi). – **4 lokasi**

2 lokasi berkaitan dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Permasalahan Tanah Transmigrasi yang bersinggungan dengan HGU atau Kawasan Hutan

Selesai : Sulawesi Tenggara (1 lokasi);
P2: Sumatera Selatan (1 lokasi)

Gerak Cepat Gugus Tugas Reforma Agraria
Kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) telah dibentuk, terdiri dari:

- Tim Rencana Aksi Nasional**
Ketua: Menteri Koordinator Bid. Perekonomian
- GTRA Pusat**
Ketua: Menteri ATR/Ka. BPN
Koordinator Pelaksana: Wakil Menteri ATR/WaKa. BPN
- GTRA Provinsi**
Ketua: Gubernur
Koordinator Pelaksana: Sekretaris Daerah
- GTRA Kabupaten/Kota**
Ketua: Bupati/Walikota
Koordinator Pelaksana: Sekretaris Daerah
- Tim Pelaksana Harian GTRA**
Ketua Pelaksana Harian: Dirjen Penataan Agraria, Kementerian ATR/BPN
- Tim PLH GTRA Provinsi**
Ketua Pelaksana Harian: Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi
- Tim PLH GTRA Kabupaten/Kota**
Ketua Pelaksana Harian: Kepala Kantor Pertanahan

GTRA terdapat di 34 Provinsi dan 97 Kabupaten/Kota

Melayani, Profesional, Terpercaya @atr_bpn Kementerian ATRBPN @kementerian.atrbpn

Kelembagaan agraria yang dimanfaatkan *untuk mencapai tujuan dimaksud adalah Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA)*, yang pada saat ini telah terbentuk di hampir seluruh Provinsi dan Kabupaten/kota di Indonesia.

Berbagai terobosan dan capaian yang telah dilakukan oleh GTRA menunjukkan berbagai prestasi.

Pada satu sisi masih *memerlukan revitalisasi GTRA baik dalam struktur, fungsi maupun melalui inovasi teknologi, maka GTRA Summit menjadi penting untuk dimaknai sebagai ikhtiar untuk memahami, menyamakan berbagai persepsi dan membangun kolaborasi dari seluruh stakeholders GTRA.*

1. GTRA di daerah menjadi pelaku Transformasi Reforma Agraria.
2. Transformasi Reforma Agraria harus menjadi gerakan bersama.
3. Memahami dan memaknai bersama terkait dengan lingkungan strategis baik sosial, ekonomi dan politik pada lingkup regional, nasional maupun global.
4. Memaknai rumusan agraria sebagai rumusan yang utuh dan tidak terpisahkan terkait dengan bumi, air dan ruang angkasa serta sesuatu yang terkandung didalamnya.
5. Penataan aset dan penataan akses harus menjadi objek yang seimbang, sehingga anggota GTRA mesti menempatkan kedua penataan objek Reforma Agraria menjadi prioritas.
6. Memanfaatkan teknologi informasi menjadi prasyarat utama dalam melaksanakan Reforma Agraria melalui Bhumi GTRA
7. Harmonisasi peraturan yang mengikat perjalanan Reforma Agraria



GTRA SUMMIT KARIMUN 2023 UNTUK MENJAWAB TANTANGAN REFORMA AGRARIA



ATR/BPN
MAJU DAN MODERN

“Transformasi Reforma Agraria: Mewujudkan Kepastian Hukum, Keberlanjutan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat”

Sub Tema :

1
Penguatan Skema Legalisasi Aset Permukiman di atas Air, Pulau - Pulau Kecil dan Pulau Kecil Terluar

2
Resolusi Penyelesaian Konflik Agraria aset BMN, BUMN/BUMD dengan Penguasaan Masyarakat

3
Arah Kebijakan Penyelesaian Permasalahan Tanah Transmigrasi

4
Percepatan Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan

"No one left behind, no parcel left behind"

Diperlukan komitmen bersama dalam menyusun resolusi penyelesaiannya, sekaligus memastikan potensi besar dalam menata keadilan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di seluruh tanah air dapat diwujudkan.

Semua pihak harus dilibatkan dalam upaya ini, dan tidak ada warga masyarakat yang ditinggalkan, seiring dengan semangat "No one left behind, no parcel left behind" untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.

SPIRIT DEKLARASI KARIMUN

“Dari Sama-sama Kerja ke Kerja Sama untuk Reforma Agraria”



Deklarasi Karimun sebagai upaya penegasan komitmen lintas sektor, hubungan pusat–daerah, dan partisipasi masyarakat, yang berisikan komitmen untuk menyelesaikan tantangan dan permasalahan dalam mensukseskan agenda Reforma Agraria

Deklarasi Karimun akan menjadi rujukan untuk menghasilkan solusi inovatif dalam menghadapi tantangan-tantangan pelaksanaan program strategis nasional (PSN) Reforma Agraria, sebagai upaya untuk mencapai target rencana jangka panjang menengah nasional (RPJMN) 2020-2024.

Bhumi GTRA - Integrasi Penataan Aset dan Akses Sebagai Tool bagi Forum GTRA dalam Mengambil Kebijakan



Penguasaan & Pemilikan Tanah

- PTSL
- Redistribusi Tanah
- Sertipikasi Lintas Sektor
- Transmigrasi
- Batas Kawasan Hutan
- Hak Tanggungan

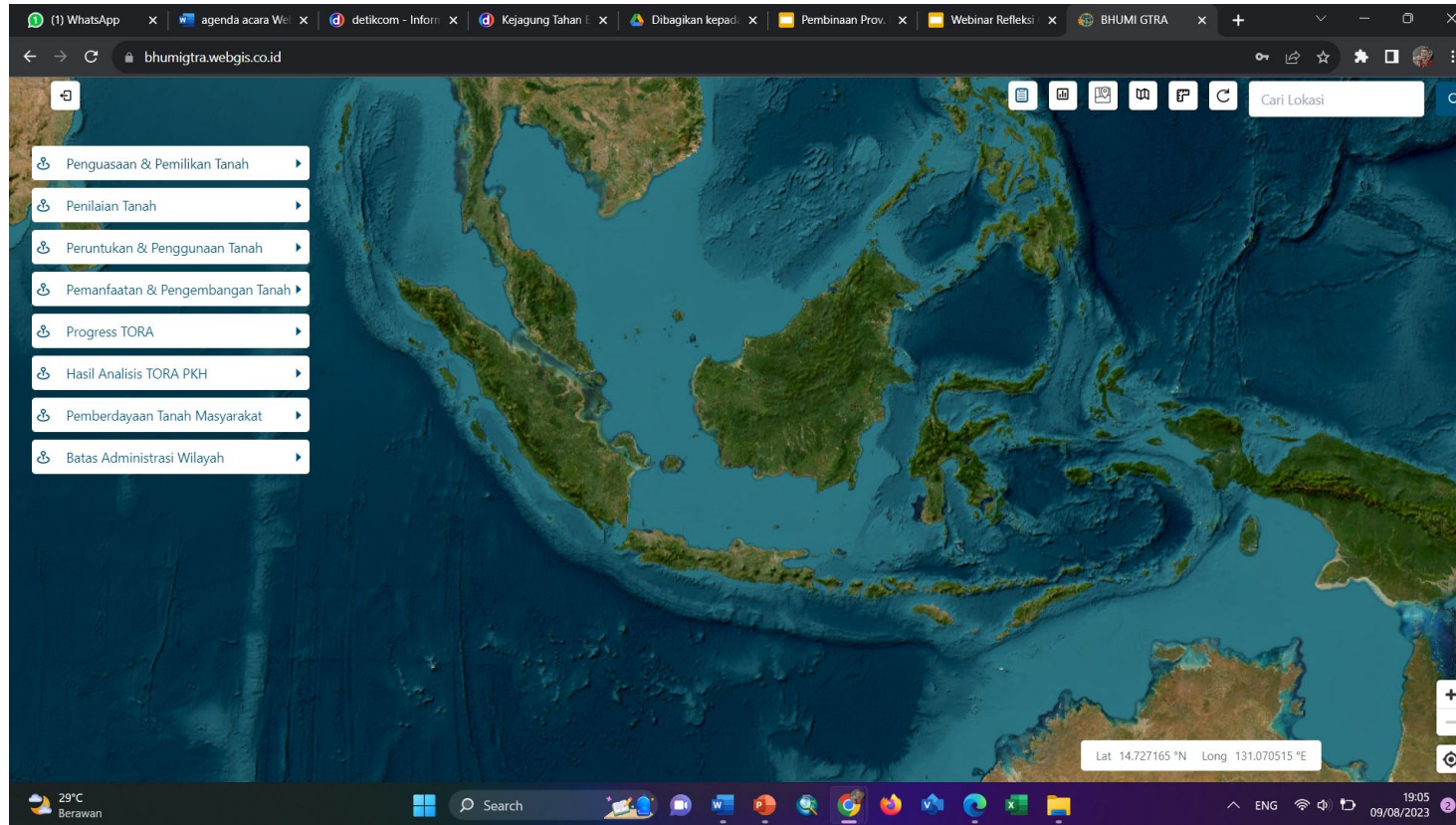
Penilaian Tanah

- BPHTB
- PPH
- Zona Nilai Tanah

Perbesar Data Tentang Data

Opacity

Sebaran Transaksi



Peruntukan & Penggunaan Tanah

- RDTR
- RTRW

Pemanfaatan & Pengembangan Tanah

- KKPR
- PTP
- Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Tanah Objek Reforma Agraria

- 37 Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)
- HGU Yang Habis

Pemberdayaan Tanah Masyarakat

- Pemetaan Sosial Sleman
- Pemetaan Sosial Malang



Link Akses :

<https://bhumi.gtra.atrbpn.go.id/>



TERIMA KASIH

**DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN AGRARIA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

